

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU),  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH (SKPD) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2019**

**Indah Ningsih\*, Anik Malikh\*\*, dan Siti Aminah Anwar\*\*\***

**Universitas Islam Malang**

**Email: [indharningsih369@gmail.com](mailto:indharningsih369@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The implementation of fiscal decentralization and regional autonomy policies has been implemented since early 2001, where the central government transferred authority to regional governments to optimize and manage their regional potential. The implementation of this policy has several problems, one of which is differences of opinion in the use of the balancing fund. For this reason, this study aims to determine the effect of General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD) and Regional Work Unit Financial Reports (SKPD) on District / City Regional Expenditures in East Java Province 2015 to 2019, using Purposive sampling technique and use multiple linear regression analysis with Statistical Package for Social Sciences (SPSS), the data used is secondary data from relevant data sources. The results showed that there was no flypaper effect on regional spending. The general allocation fund, regional revenue, and regional work units significantly influence regional spending.*

**Keywords:** *flypaper effect, general allocation funds, local revenue, regional work units, regional spending.*

**ABSTRAK**

Implementasi desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah dilaksanakan sejak awal tahun 2001, dimana pemerintah pusat memindahtangankan wewenang ke pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan mengelola potensi daerahnya. Penerapan dari kebijakan ini terdapat beberapa permasalahan, salah satunya perbedaan pendapat dalam penggunaan dana perimbangan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sampai 2019, dengan menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS), data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah. Dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, serta satuan kerja perangkat daerah secara signifikan mempengaruhi belanja daerah.

**Kata kunci:** *flypaper effect, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, satuan kerja perangkat daerah, belanja daerah.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik. Dimana era baru membawa perkembangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah. Yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Adapun Undang-Undang ini dikeluarkan dengan harapan dapat mencakup keseluruhan peraturan terkait tata Kelola keuangan pemerintah, baik itu lembaga keuangan daerah atau pun keuangan negara. Aset daerah berupa sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dikelola secara mandiri, efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah tersendiri tanpa harus mengandalkan keuangan dari atasan tertinggi atau dana dari pemerintah pusat. Sehingga memberikan dampak menumbuhkan kesejahteraan di masyarakat daerah dalam segala aspek.

Awal dari implementasi desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah yaitu dimulai pada awal tahun 2001. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 untuk melaksanakan wewenang pemerintah daerah (PEMDA), pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari sumber daya alam dan pajak. Selain itu, sumber pendanaan lainnya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Diantara sejumlah dana perimbangan yang telah dijelaskan, Dana Alokasi Umum dirasa lebih banyak digunakan dan lebih fleksibel, sehingga penggunaan yang tepat dalam pemanfaatannya yang optimal, DAU benar-benar dapat menjadi pendorong perekonomian daerah.

Ciri kemandirian daerah dapat dilihat dari PAD yang dimiliki oleh setiap daerah, namun masih banyak daerah yang masih menggantungkan sumber pendanaan daerahnya pada dana transfer. Perbandingan proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan daerah lainnya, termasuk PAD. Dana Alokasi Umum ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat dilihat dari segi perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memahami fungsi DAU, dimana pemerintah pusat mentransfer dana untuk menyama ratakan keuangan antar daerah. Sedangkan dari pemerintah daerah memahami pemberian transfer dana ini dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan daerah. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman sehingga menyebabkan pemerintah daerah merespon dana belanja daerah lebih tinggi dari pada transfer dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum yang seharusnya dari Pendapatan Asli Daerah sendiri atau lebih dikenal dengan sebutan *flypaper Effect* (Wahyuni dan Supheni, 2017).

### **Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Teori**

#### **Otonomi Daerah**

UU No.23 Tahun 2014, menjelaskan bahwasannya daerah memiliki wewenang penuh atas kepentingan pengelolaan. Mengelola seluruh kepentingan masyarakat daerah berdasarkan prakarsa sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dari otonomi daerah dilakukan menurut asas desentralisasi yang artinya penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara otonom dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasi dan memantau perkembangan dari setiap daerah dalam hal pertumbuhan perekonomian serta untuk mengetahui pertumbuhan dan penurunan dari tingkat pendapatan daerah hal ini akan memberikan pengaruh yang besar pada terlaksananya otonomi daerah.

### **Desentralisasi**

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 bahwa Desentralisasi merupakan pemberian kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom dengan maksud untuk menata dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di pemerintah dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menoleh antara keterkaitan dampak-dampak dari pelayanan publik, secara garis besar desentralisasi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu; 1) Desentralisasi Politik, yang berhubungan dengan perlimpahan seluruh kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam segala aspek kegiatannya termasuk penerapan standar dan berbagai peraturan-peraturan yang ada. 2) Desentralisasi Administrasi, berhubungan dengan retribusi atau perpindahan kekuasaan, tanggung jawab dan sumber daya diberbagai tingkatan yang ada di pemerintahan. Hal ini bisa lebih efektif dengan syarat kapasitas yang ada harus cukup memadai beriringan dengan kelembagaan yang cukup baik pula. 3) Desentralisasi Fiskal, yang berhubungan dengan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan, merancang pengeluaran belanja rutin serta investasi, dan hak untuk mendapatkan transfer dana dari pemerintahan tertinggi.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana pemerintah yang ditransferkan dari penerimaan APBN ke pemerintah daerah. Tujuan pengalokasian adalah untuk meratakan tingkat keahlian daerah dalam hal penyediaan dana ke daerah. Menurut Pasal 14 Peraturan tentang Pengelolaan Dana Perimbangan Pemerintah tahun 2000, DAU mempunyai dua tujuan, yaitu: (1) Pembagian yang adil, yaitu pemerintah pusat membagikan pendapatan secara adil dan merata untuk kepentingan berbagai daerah serta menjamin tidak terdapat ketimpangan antar daerah. Meskipun (2) berkecukupan, namun harus ada cukup ruang untuk mengisi kesenjangan finansial yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: standar pelayanan minimal (SPM), beban dan kewenangan (Mardiasrno, 2018).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal salah satu wujudnya yaitu memberikan dana-dana penerimaan bagi daerah dari potensi dan sumber aset dari daerah itu sendiri sehingga dapat menghasilkan pemasukan pendapatan. Wewenang daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan terdapat 4 jenis kelompok, diantaranya: hasil pendapatan pajak daerah, hasil pendapatan retribusi daerah, hasil pendapatan perusahaan milik daerah dan hasil pendapatan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Minimnya pemasukan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu kendala utama yang harus Pemerintah Daerah hadapi dalam melaksanakan otonomi daerah. PAD dengan proporsi yang rendah menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat yang rendah pula dalam mengatur keuangan daerahnya. Dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum yang akan membiayai sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, yaitu menggunakan cara alternatif dalam jangka waktu pendek dengan menggali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak boleh mengandalkan ataupun bertumpu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota saja tetapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dan melaporkan hasil posisi laporan keuangannya dan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Bagian Keuangan yang sudah diatur dalam Permendagri. Sedangkan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan pasal 264) membahas mengenai prosedur akuntansi SKPD meliputi beberapa proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, selanjutnya berakhir pada proses pelaporan keuangan untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD secara komputerisasi maupun secara manual. Prosedur akuntansi pengeluaran kas, penerimaan kas, akuntansi aset dan akuntansi selain kas juga diatur didalam Permendagri No.13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264).

### Belanja Daerah

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah merupakan pengurangan nilai aset atau kekayaan bersih daerah dalam satu periode tahun anggaran yang sedang berlangsung dan sudah menjadi kewajiban semua daerah. Dalam APBD, belanja pemerintah daerah di kelompokkan menjadi berikut ini: Belanja modal, belanja operasional dan belanja tak terduga. Sedangkan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung.

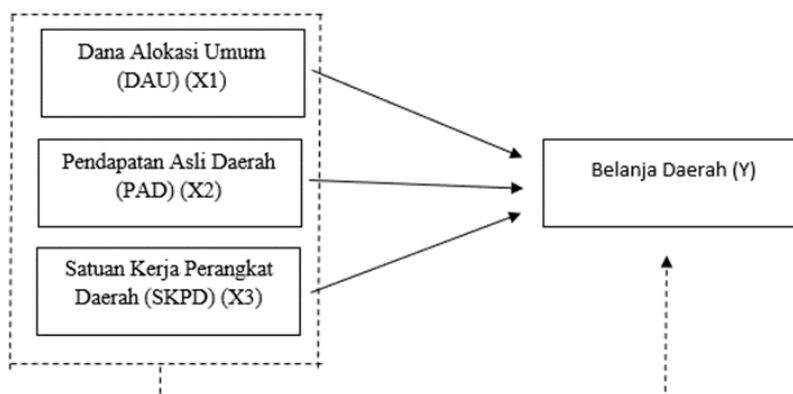
### *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* (efek kertas layang) merupakan kondisi dimana pemerintah daerah merespon (anggaran belanja) melebihi dari dana transfer (*grants*) pada saat menggunakannya yang diproksikan dengan DAU dari pada diproksikan dengan PAD yang menggunakan kemampuannya sendiri. Sehingga istilah *flypaper effect* digunakan saat pemerintah menggunakan anggaran dana alokasi umum lebih besar dalam penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan daerah dari pada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Situasi ini akan memberikan dampak yang serius mengenai meningkatnya suntikan dana untuk belanja daerah itu lebih besar dari pada penerimaan pendapatan daerah sendiri.

### Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian, maka dapat kita buat kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



### Hipotesis

Sesuai dengan penjelasan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah :

- H1 : terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Belanja Daerah
- H2 : terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah
- H3 : terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
- H4 : terdapat pengaruh antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Belanja Daerah

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Hasil pengujian dari penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana datanya bersumber dari informasi yang bentuk bilangan-bilangan atau angka-angka, yang dilakukan dan diambil dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Jawa Timur . Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan 06 Juli 2020 sampai dengan 04 Januari 2021.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang ada di penelitian ini yaitu seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2019. sampel yang digunakan sebagai bahan penelitian, yaitu:

- a) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Keuangan APBD dan SKPD dari tahun 2015-2019.
- b) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur mencantumkan data-data mengenai DAU, PAD, dan Anggaran Belanja Daerah dari Tahun 2015-2018 pada Laporan Keuangan SKPD yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana Laporan Keuangan dari DAU, PAD dan SKPD pada tahun 2015 akan mempengaruhi Belanja Daerah pada tahun 2016 dan seterusnya.

### Variabel Penelitian Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2016), Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat umum dan digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang horizontal sehingga didapat pemerataan keuangan antar daerah. Bentuk pengukuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) berupa jumlah rupiah (Rp). Dasar alokasi untuk Kabupaten/Kota dapat dihitung menggunakan rumus perhitungan dari DAU, sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

#### b. Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan kemandirian dan menghadapi otonomi daerah, pendapatan asli daerah akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dari tingkat keberhasilan daerah yang mandiri. Pengukuran dan penilaian terhadap sumber-sumber PAD perlu di adakan untuk meningkatkan PAD agar sumber-sumber dari PAD dapat

dimaksimalkan secara berkesinambungan tanpa memperburuk sumber dari aset daerah. Adapun rumus dalam menghitung penerimaan daerah dalam kurun waktu yang bersangkutan antara lain :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

### c. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Untuk mengukur Laporan Keuangan SKPD yaitu menggunakan ukuran efisiensi, efektivitas dan ekonomi. Sedangkan efisiensi diukur menggunakan rasio antara output dengan input (Mardiasmo, 2018). Semakin besar hasil output yang dihasilkan dari pada input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

### Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang ditimbulkan akibat adanya variabel bebas. Belanja Daerah menjadi variabel dependen (terikat) didalam penelitian ini. Belanja daerah dibagi menjadi dua bagian, belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk memudahkan penilaian rasionalitas biaya perencanaan dan kegiatan. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Anggaran Belanja Tidak Langsung} + \text{Anggaran Belanja Langsung}$$

### Metode Analisis Data

Kegunaan dari metode analisis data ini yaitu untuk menguji seberapa besar variabel bebas dapat mempengaruhi variabel dependen. Analisis ini diolah dengan menggunakan bantuan *software* SPSS. Persamaan regresi dalam penelitian ini di rumuskan dengan :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{SKPD} + e \dots$$

Keterangan:

Y	= Belanja Daerah
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisiensi Regresi
DAU	= Dana Alokasi Umum
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
e	= <i>eror</i>



## PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Proses uji statistik deskriptif ini menggunakan dokumen *annual report* yang dilakukan pada periode 2015 sampai 2019 dengan jumlah sampel atau N sejumlah 70 data. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

**Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	152	11,1315	12,6966	11,839398	,2783237
PAD	152	11,0180	12,7128	11,596899	,3554638
SKPD	128	,0001	4,2481	,286194	,4394584
Belanja Daerah	152	11,8493	12,9126	12,287373	,2071443
Valid N (listwise)	128				

Sumber: Output SPSS, 2021

### Hasil Uji Normalitas

Penggunaan dari uji normalitas ini untuk menguji antara variabel independen dan variabel dependen dapat terdistribusi secara normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Pada variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai *Kolmogorov-smirnov* = 1,207 dan nilai signifikan = 0,109. Dapat disimpulkan bahwa nilai sig (0,109) >  $\alpha$  (0,05) dapat dikatakan bahwa variabel dana alokasi umum terdistribusi secara normal. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *Kolmogorov-smirnov* sebesar = 1,294 dengan signifikan = 0,070. Dari perhitungan spss ini menunjukkan nilai sig (0,070) >  $\alpha$  (0,05) bisa kita nyatakan variabel pendapatan asli daerah terdistribusi secara normal. Sedangkan untuk variabel Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menunjukkan hasil *Kolmogorov-smirnov* sebesar 1,185 dan nilai signifikannya sebesar 0,121. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig (0,121) >  $\alpha$  (0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel SKPD terdistribusi normal.

Dari Hasil perhitungan spss, Variabel Belanja Daerah menunjukkan nilai *Kolmogorov-smirnov* sebesar 0,901 dan nilai signifikannya sebesar 0,392. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig (0,392) >  $\alpha$  (0,05) dinyatakan terdistribusi normal. Maka hasil analisis diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* variabel dependen dan independen > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang terdapat dalam hasil penelitian terdistribusi normal.

### Hasil Uji Hipotesis

#### a. Uji F (Simultan)

**Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,322	3	1,441	264,696	,000(a)
	Residual	,675	124	,005		
	Total	4,997	127			

Sumber: Output SPSS, 2021

Dari tabel 4.7 dijelaskan untuk nilai  $F_{hitung}$  (264,696) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana < nilai  $\alpha$  (0,05), jadi  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa

variabel independen (variabel X) dari penelitian ini secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel Y).

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,930(a)	,865	,862	,073778

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan besarnya  $R^2$  Square sebesar 0,865 (86,5%) variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan dengan variasi dari ketiga variabel yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan sisanya yang sebesar 13,5% bisa menggunakan dari variabel-variabel yang lainnya dan tidak termasuk didalam variabel penelitian ini.

**c. Uji t ( Uji Parsial)**

**Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,579	,408		3,868	,000
	DAU	,498	,030	,556	16,809	,000
	PAD	,416	,019	,727	22,013	,000
	SKPD	,013	,006	,071	2,142	,034

Sesuai perhitungan dari pengolahan spss pada tabel 4.10 dapat kita lihat nilai tabel dari variabel PAD, DAU dan SKPD mempunyai nilai sig < dari 0,05 yang artinya variabel PAD, DAU dan SKPD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara DAU dan alokasi belanja daerah yaitu, alokasi DAU yang relatif besar diberikan terhadap pemerintah daerah yang mempunyai alokasi belanja daerah yang besar, peningkatan alokasi belanja daerah merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja daerah semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Sehingga dapat dilihat dari hasil kinerja laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, dapat dilihat dari hasil laporan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pengawasan laporan keuangan daerah.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitiannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa semua variabel X yang ada dipenelitian ini secara keseluruhan (Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah).



2. Dari hasil pengujian yang dilakukan secara parsial atau uji t menunjukkan bahwa variabel X secara individu (Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau variabel Belanja Daerah.
3. Sedangkan pengujian yang dilakukan secara parsial pada variabel DAU dan PAD dengan membandingkan hasil nilai antar kedua variabel, menunjukkan hasil bahwa tidak terjadi fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data penelitian diambil dari data sekunder dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPk), dan tidak dilakukan (observasi) atau secara langsung sehingga hasil data yang diperoleh kurang maksimal untuk bisa diteliti dan diamati lebih dalam mengenai informasi-informasi anggaran keuangan daerah dan sumber-sumber pendanaannya.

### **Saran**

Dari keterbatasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan populasi dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
2. Dapat menambahkan variabel-variabel lainnya sebagai variabel independen yang berkaitan dengan Belanja Daerah, salah satunya DBH, DAK, dan SiLPA.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Rohman. 2009. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Maksi Vol 7, No.2 ISSN: 1412-6680
- Ahad Solikin. 2016. Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (SILPA) (Studi Tahun 2012-2014).Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.16 No.1, februari 2016:11-25.
- Amalia, Wia Rizqi, Wahyudin Nor dan M. Nordiansyah. 2015. *Flypaper effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol.15, No 1, Februari 2015: 1-12.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bachrul Elmi, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, Jakarta: UI Press.
- Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Dani Vardiansyah. 2008. Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. II Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Gorodnichenko, Y. 2011. "Effect of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Government". The Case of Ukraine, Master Thesis, University of Kiev.
- Hariadi, P, dkk. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, Indhi. 2011. Analisis *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jurnal Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ishak, Arafah dan Hasnah. 2019. *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare. Jurnal Skripsi. Univ. Muhammadiyah Parepare. Sulawesi Selatan.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Khusaini., Mohammad. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE Unibraw, Malang.
- Litvack, J. and J. Seddon (Eds). (1999). *Decentralisation briefing notes*. Washington DC: Word Bank Institute.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maimunah, MutiaraF. 2006. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mudrajad Kuncoro. 2007. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga Jakarta.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemrintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
- Sarmada Rahma. 2019. Analisis *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota di Privinsi DIY dan Nanggro Aceh Darussalam. Jurnal Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. 2010. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/ Kota Propinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Vol. 18, No 1 Undip, Semarang.
- Simanjuntak, Binsar H, 2005, Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Jurnal akuntansi Pemerintah Vol. 1, NO. 1.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik.2015.Dasar Metodologi Penelitian.Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tresch, Richard. 2005. "*Finance Public Anormative Theory*".*Department of Economic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts*.
- Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Utami, Kurnia. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal Wahana Riset Akuntansi Vol.1, No1, April 2013.
- UU No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Wahyuni, Supheni. 2017. *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Jurnal Skripsi. STIE. Nganjuk.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id)

\*) Indah Ningsih adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

\*\*\*) Anik Malikhah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

\*\*\*\*) Siti Aminah Anwar adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang